



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

TRI GALUH SUWITO
NIM. 11427103997

**PROGRAM ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

H. Mhd. Kastulani, SH., MH
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Persetujuan Skripsi
Saudara Tri Galuh Suwito

Pekanbaru, 1 Agustus 2019
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum
UIN SUSKA RIAU

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan pengarahannya serta perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara **Tri Galuh Suwito** yang berjudul: **Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Kampar Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah** telah dapat diajukan sebagai syarat untuk menempuh ujian guna meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Harapan saya semoga dalam waktu dekat ini saudara yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum. Demikianlah harapan saya mudah-mudahan skripsi ini berguna dan bermanfaat hendaknya.

Wassalam
Pembimbing.

H. Mhd. Kastulani, SH., MH
NIP. 19630909 199007 1001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH"**

yang ditulis oleh :

Nama : **Tri Galuh Suwito**
 NIM : 11427103997
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2019
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris
Dra. Nurlaili, MSI

Penguji I
Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II
Lovelly Dwina Dahan, SH., MH

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Tri Galuh Suwito (2019): “Implementasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011”

Pajak merupakan iuran wajib atau kontribusi wajib dari rakyat yang akan dimasukkan ke kas negara untuk pembangunan fasilitas umum dan tidak dapat mendapatkan imbalan secara langsung. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor seperti yang di jelaskan pada pasal 9 ayat 1 yang berbunyi pajak kendaraan bermotor di kenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Namun kenyataannya di Kabupaten Kampar masih tingginya angka wajib pajak yang tidak melaksanakan apa yang di perintahkan oleh peraturan tersebut. dengan adanya latar belakang tersebut, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?, dan Apa Saja Yang Menjadi Kendala Masyarakat Dalam Membayarkan Pajak Kendaraan Bernotornya?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan untuk mengetahui Apa Saja Yang Menjadi Kendala Masyarakat Dalam Membayarkan Pajak Kendaraan Bernotornya. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder. Alat pengumpulan data adalah observasi dan wawancara, angket.

Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa implementasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah masih rendah, hal ini di akibatkan dari kurangnya sosialisai tentang pajak kendaraan bermotor secara intensif yang dilakukan oleh petugas perpajakan dan penegakan hukum oleh petugas perpajakan terhadap wajib pajak, adapun faktor kendala yang di alami masyarakat melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor adalah faktor jarak, faktor ekonomi, faktor waktu, serta pelayanan dan fasilitas yang kurang baik.

Kata kunci: *Implementasi, Pajak Kendaraan Bermotor*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah swt atas rahmat dan hidayahnya yang senantiasa diimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. shalawat dan salam juga selalu tercurahkan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad saw. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amiin.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan izin dan rahmat Allah swt penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Peembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah” ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak kalangan yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi selama proses penelitian dan penulisan.

Tentunya penulis mengakui banyak menemui kesulitan dan hambatan terutama pengumpulan literatur bahan dan pengolahan data. Namun, berkat bimbingan, motivasi, masukan serta support dari berbagai pihak, alhamdulillah penulisan skripsi ini dapat selesai. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua saya ayahanda Sipon dan ibunda Kasmini, terimakasih atas semua doa dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis Selama ini, yang telah memberikan motivasi, semangat, dan juga dukungan baik moril maupun materiil, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor, Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Drs. H. Promadi, MA., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Hajar Hasan M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. Heri Sunandar MCL, Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. Wahidin S.Ag dan Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum yakni Dr. Magfirah MA.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Muslim S.Ag., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak H. Mhd. Kastulani SH., MH, selaku pembimbing yang luar biasa yang telah memberikan ilmu, motivasi dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

7. Kakak saya Damai setiawan yang telah membantu menguliahkan penulis di UIN SUSKA RIAU, sehingga penulis dapat menyandang gelar S.H, tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain ucapan Terimakasih
8. Arifin Pitoyo SH, Abdul Haris Setiawan SH, Al Basya SH, Hendri SH, Lutfi Fuadi, hendri Nasution SH, Rifwan Hadi, Aditiya Asman, Hafi Muammar SH, Rohmatul Syahdi SH, Ahmad Fadhil SH, dan Iis Dahlia SE yang telah membantu penulis baik moril maupun Materil.
9. Kawan-kawan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu telah ikut membantu dalam penulisan skripsi ini baik itu bantuan moril dan materiil.
10. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam segala keterbatasan seperti yang telah diungkapkan di atas, penulis tetap berusaha memberikan yang maksimal, karena keinginan untuk belajarlaha yang mendorong terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih banyak atas bantuannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan segala kerendahan hati.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 5 Oktober 2019

Penulis

Tri Galuh Suwito

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Lokasi Penelitian.....	11
3. Populasi dan Sampel	11
F. Sumber Data.....	12
G. Metode Pengumpulan Data	13
H. Metode Analisis Data	14
I. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kabupaten Kampar.....	16
B. Visi dan Misi Kabupaten Kampar	21
C. Tinjauan Umum Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Riau Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Kampar ...	24
D. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Riau	26
E. Uraian Tugas UPT Pendapatan Kabupaten Kampar	26
F. Struktur Organisasi.....	31
BAB III KERANGKA TEORI	
A. Pemerintah daerah	32
B. Implementasi Kebijakan Publik	37
C. Pengertian pajak	44
D. Sistem perpajakan	45
E. Fungsi Pajak	46
F. Sistem Pemungutan Pajak	47
G. Retribusi daerah, sumbangan dan iuran	49
H. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

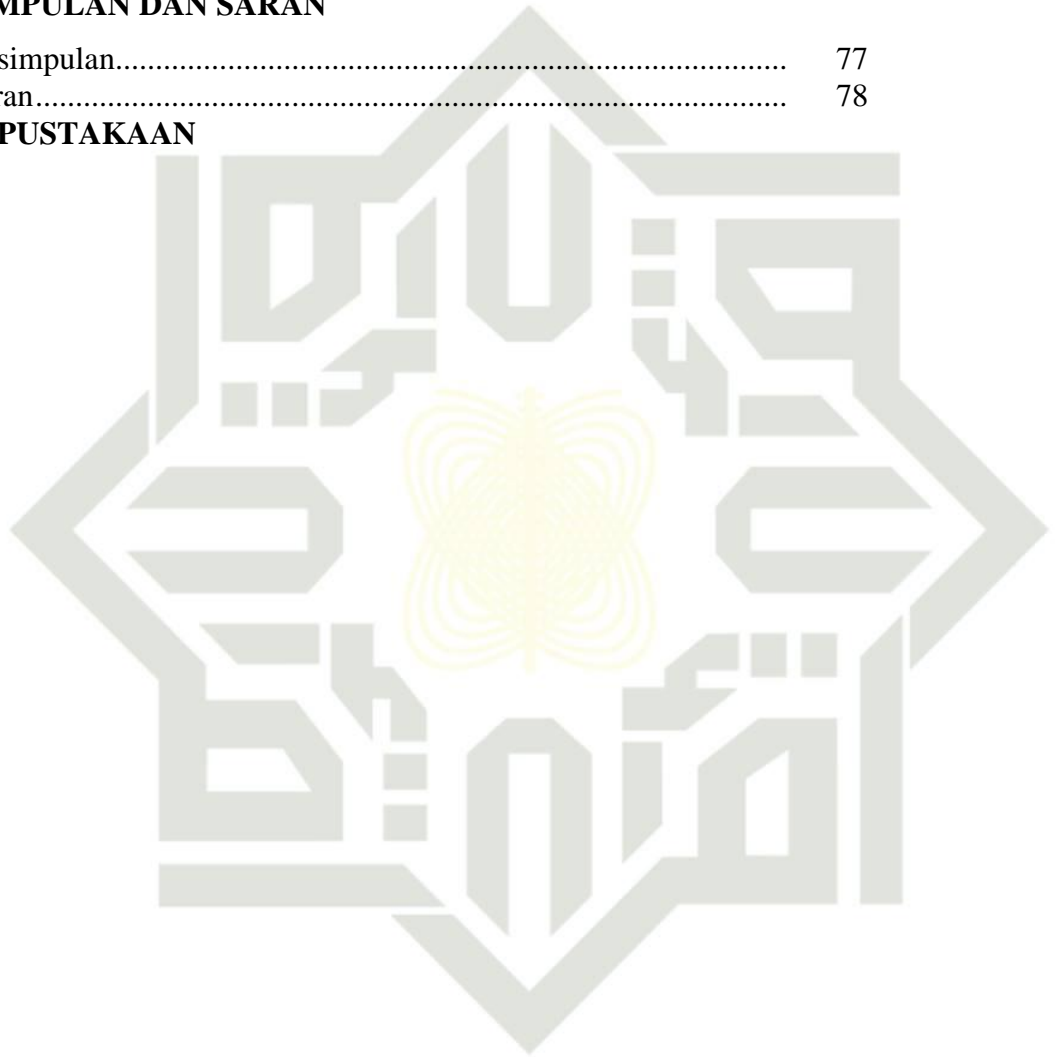
A. Implementasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	60
B. Kendala Yang Dialami Masyarakat Kabupaten Kampar Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bernmotor	69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel	12
Tabel IV.1	Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	63
Tabel IV.2	Tanggapan Responden Tentang Pemahaman Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	64
Tabel IV.3	Tanggapan Responden Tentang perilaku hukum masyarakat berdasarkan pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.....	66
Tabel IV.4	Data Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor	67
Tabel IV.5	Tanggapan Responden Tentang Faktor Jarak Saat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	71
Tabel IV.6	Tanggapan Responden Tentang Faktor Waktu Saat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	72
Tabel IV.7	Tanggapan Responden Tentang Faktor Ekonomi Saat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	74
Tabel IV.8	Tanggapan Responden Tentang Pelayanan Dan Fasilitas Saat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	76

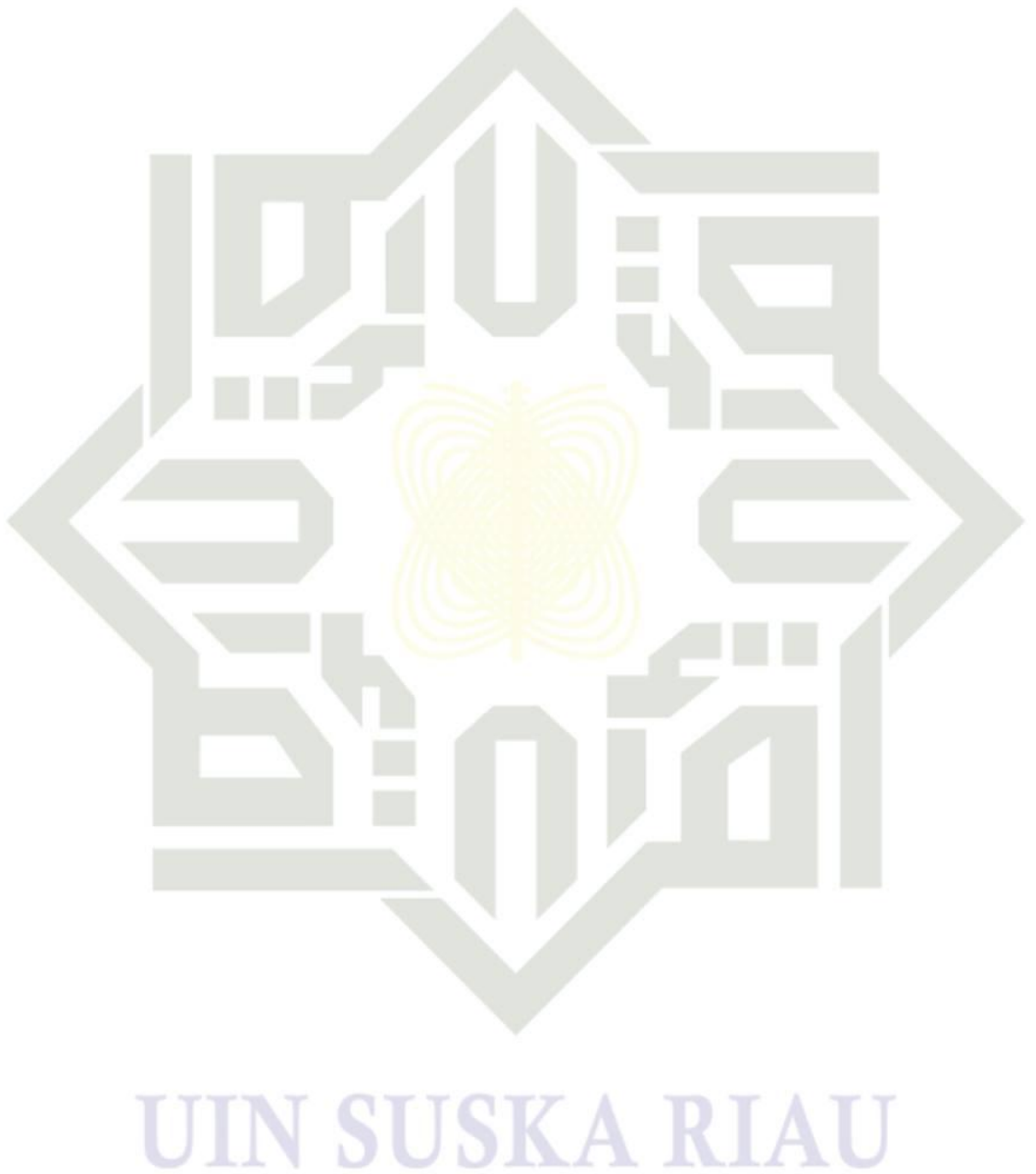


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Bagan Oraganisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas.....	32
--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, ini berarti bahwa segala bentuk penyelenggaraan bernegara didasarkan kepada hukum-hukum yang berlaku¹. Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, di butuhkan anggaran pendapatan dan belanja negara yang salah satunya bersumber dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan tertinggi negara. Pemungutan pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang dikeluarkan guna mewujudkan pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial². Dari uraian tersebut tampak bahwa negara memerlukan dana untuk kepentingan rakyat.

Dasar hukum yang mengatur tentang pengenaan pajak tercantum pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang³. Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang meletakkan kewenangan pada negara untuk

¹ Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

² Wirawan B. Ilyas, Richart Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal.5

³ Undang-Undang Dasar 1945, *Op.cit*, pasal 23 ayat 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memungut pajak kalau negara membutuhkannya, tetapi dengan syarat harus berdasarkan undang-undang⁴

Pajak secara umum dapat di artikan sebagai iyuran wajib rakyat kepada negara dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang nantinya akan di peruntukkan untuk kepentingan umum sehingga dapat di paksakan dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, Negara harus mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan⁵.

Pengertian pajak menurut para ahli diantaranya sebagai berikut.

1. Rochmat Soemitro, pajak adalah iyuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi : pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investmen*⁶

⁴ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 5

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal. 1

⁶ *Ibid*, hal. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kotraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Smeets mengakui bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi budgeeter baru kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada definisinya⁷.

Pajak merupakan salah satu alat yang penting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi, politik sosial yang mengandung berbagai sasaran sebagai berikut:

1. Pengalihan sumber dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah.
2. Pendistribusian beban pemerintah secara adil dalam kelas-kelas penghasilan (*Vertical Equity*) dan secara merata bagi masyarakat yang berpenghasilan sama (*Horizontal Equity*).
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan perluasan kesempatan kerja⁸.

Ditinjau dari pengelolaannya, pajak di bedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang di pungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh presiden melalui menteri keuangan dengan pelaksanaannya berada pada direktoral jendral pajak. Pajak pusat antara lain terdiri dari :

⁷ Wirawan B.Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak, Op.Cit.*, hal. 6

⁸ Fitriati Is, *Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu*, (Jurnal Ilmu Ekonomi ,Vol.2.No.1 Januari 2013) hal. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pajak penghasilan
2. Pajak pertambahan nilai
3. Pajak penjualan barang mewah
4. Pajak bumi dan bangunan
5. Pajak perolehan tanah dan bangunan
6. Bea materai
7. Fiskal luar negeri⁹

Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola dan di fungsikan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Pajak menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak menyebutkan pajak daerah adalah kontribusi wajib bagi yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹⁰.

Secara umum pajak merupakan sumber pembiayaan yang paling besar bagi negara. Fungsi pajak ada dua yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur *regulerend*. Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-

⁹ Djoko Mulyono, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Andi, 2010) hal.9

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak*, pasal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang¹¹. Sedangkan fungsi mengatur *regulerend* yaitu pajak sebagai alat mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi¹². Fungsi mengatur artinya fungsi pajak yang di gunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagai fungsi tambahan, fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama dan dipakai sebagai alat kebijakan.

Untuk timbulnya kewajiban pajak, tentunya harus ada masyarakat. Karena pajak diadakan untuk memenuhi kebutuhan bersama atau kepentingan umum. sementara kepentingan pribadi dan kebutuhan masyarakat di penuhi bukan dari uang pajak. Tanpa adanya masyarakat maka tentu tidak akan ada pajak¹³. sumber pendapatan daerah salah satunya adalah pajak daerah, yang diharapkan mampu membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri.

Di Provinsi Riau terdapat peraturan yang mengatur tentang perpajakan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pada Peraturan Daerah (Perda) ini ada beberapa jenis pajak yang diatur yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Pajak Air Permukaan. Menurut pasal 1 ayat 12 pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor pada pasal tersebut ialah semua kendaraan beroda

¹¹ Abu Samah, *Memahami Hukum Pajak di Indonesia*, (Pekanbaru: Uin Suska, 2016), hal. 7

¹² Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2009), hal. 2

¹³ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2009),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang di operasikan di air. Kemudian besaran tarif pajak telah di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor¹⁴. Apabila wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut¹⁵.

Setiap wajib pajak diharuskan membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor baik itu kendaraan umum maupun bukan umum. Pada pasal 9 angka 1 menyebutkan pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor tidak terlepas dari pengawasan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas dibidang perpajakan hal ini sesuai dengan amanat pasal 37 ayat 2 yang

¹⁴ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 93

¹⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbunyi pejabat dibidang perpajakan daerah dapat melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak¹⁶.

Tata cara pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor terhadap wajib pajak di lakukan di kantor Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat). Di kantor tersebut terdapat tiga instansi yang terlibat dalam penanganan pajak kendaraan bermotor. Ketiga instansi tersebut adalah Kepolisian Satlantas, Dinas Pendapatan Daerah, dan Asuransi (Jasa Raharja)¹⁷. Pada wilayah Provinsi Riau tedapat satu kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang mengakumulasikan pajak kendaraan bermotor di setiap daerah Kabupaten/Kota. Untuk memudahkan pelayan terhadap wajib pajak, Gubernur selaku kepala daerah menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap Kabupaten/Kota. Di Kabupaen Kampar terdapat tiga UPT Dinas Pendapatan Daerah yaitu pada Kantor UPT pendapatan Bangkinang, UPT pendapatan Kubang Raya dan UPT pendapatan Tapung.

Pada tahun 2017 hingga 2018 tercatat sebanyak 54.804 jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar dan hanya 45.212 yang memenuhi kewajiban membayar pajak artinya masih ada sebanyak 9.592 kendaraan yang belum melaksanakan kewajibannya¹⁸. Berdasarkan sumber media online menyebutkan masyarakat masih banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotornya di kantor Samsat¹⁹.

¹⁶ Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 8 tahun 2011 tentang *pajak daerah*, Pasal 37 ayat 2

¹⁷ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia*. . . *Op.cit*, hal. 99

¹⁸ Kantor UPT Bangkinang

¹⁹ [Http://Www.Riaupos.Co/8656-Berita-Warga-Kampar-Keluhkan-Bayar-Pajak-Kendaraan.Html#.Xehj612yqew](http://Www.Riaupos.Co/8656-Berita-Warga-Kampar-Keluhkan-Bayar-Pajak-Kendaraan.Html#.Xehj612yqew), di Akses Pada Hari Rabu 13 Februari 2019 Pulul 19.35 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan berdasarkan wawancara awal yang penulis lakukan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Kampar sebanyak empat dari sepuluh masih belum melaksanakan kewajibannya membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya. Hal ini tentunya merugikan daerah, sebab salah satu sumber dana terbesar untuk pembangunan dan pembiayaan Pemerintah Daerah adalah dari pajak kendaraan bermotor yang di bayarkan oleh masyarakat.

Dari paparan latar belakang diatas, melalui pendekatan identifikasi terhadap pengguna kendaraan bermotor tampak masih banyak masyarakat di Kabupaten Kampar yang belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotornya maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah penelitian originalitas yang berjudul “IMPLEMENTASI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH”

Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan serta mengingat keterbatasan kemampuan dan dana yang tersedia dalam penelitian ini, diperlukan adanya pembatasan masalah, adapun masalah yang diteliti adalah mengenai Implementasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ?
2. Apa saja kendala yang dialami oleh masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
 - b. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Untuk menambah wawasan dan sebagai pedoman bagi penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan.
 - b. Sebagai bahan masukan, kajian dan informasi lebih lanjut bagi penulis lainnya yang ingin membahas kembali masalah ini dimasa yang akan datang.

- c. Sebagai masukan bagi instansi terkait serta masyarakat agar pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dapat terimplementasikan dengan baik.

E Metode Penelitian

Untuk mendapatkan suatu data yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, maka disusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, menurut Amiruddin penelitian sosiologis adalah penelitian yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, serta berdasarkan pada teori dan hipotesis, yaitu untuk memahami sesuatu harus melalui penyelidikan atau penelitian yang dilakukan langsung turun kelapangan dan data-data yang didapat bersumber dari studi kepustakaan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan berbagai isu dari berbagai aspek serta dengan melakukan wawancara. Penelitian hukum yang sosiologis terdiri dari penelitian berlakunya hukum yang meliputi: penelitian efektivitas hukum, penelitian dampak hukum, dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.²⁰

. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu menggambarkan objek yang akan diteliti dan kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk

²⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, menggunakan teknik pengumpulan data, dokumentasi, observasi, wawancara, kuisioner. Analisis data bersifat induktif/kualitatif yang berbentuk kata, kalimat, bagan, gambar atau foto serta menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai implementasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kampar sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di lokasi Penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar, adapun alasan penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kampar karena ada permasalahan terhadap ketidak patuhan masyarakat dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Data UPT pendapatan Bangkinang menyebutkan bahwa di Kabupaten Kampar mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2018 pendapatan di sektor pajak kendaraan bermotor²¹. Sedangkan Kepala Daerah Provinsi Riau sedang giat-giatnya untuk meningkatkan sektor pendapatan melalui pajak.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan atau objek yang menjadi populasi dalam penelitian dan ditentukan sebelumnya.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak

²¹ Sumber Data Kantor UPT Pendapatan Bangkinang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan bermotor dari tahun 2017 sampai 2018 di Kabupaten Kampar berjumlah 45.214 orang.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Metode yang digunakan dalam penetapan sampel yaitu dengan *metode purposive sampling* yaitu peneliti menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang jelas dapat mewakili terhadap populasi yang ada sehingga dapat menjawab pokok permasalahan yang peneliti angkat.²² Adapun sampel dalam penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang di ambil sebanyak 200 orang, Kepala Kantor UPT Pendapatan Bangkinang, Pegawai Kantor UPT Pendapatan Bangkinang Empat Orang.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel
1.	Kepala UPT Pendapatan Bangkinang	1	1
2.	Pegawai UPT pendapatan Bangkinang	8	4
3.	Wajib pajak	45.212	200

Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yang meliputi :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan informasi dengan mendatangi langsung pihak-pihak yang berkaitan.

²² Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers), hal.118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan bacaan dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, buku dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian.
3. Data Tersier, yaitu data yang terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, kamus istilah hukum Belanda, majalah, surat kabar dan internet.²³

Metode Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari :

1. Observasi yaitu merupakan pengamatan secara langsung ketempat penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan melalui analisa data-data dan informasi yang tersedia.
2. Wawancara yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang secara langsung bertanya kepada informan dengan cara bertatap muka langsung dan mengajukan pertanyaan yang dianggap perlu dan mengarah kepada permasalahan.
3. Studi pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku referensi yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.²⁴
4. Daftar pertanyaan, suatu daftar yang memuat pertanyaan. Jawaban merupakan nilai pertanyaan variabel.²⁵

²³ Sujonoo, dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hal.13

²⁴ Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA, 2011), hal.50

²⁵ Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 010), hal. 205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

II. Analisa Data

Analisa data dalam tulisan ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dalam melakukan, artinya menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis sajikan dalam bentuk uraian dengan memperhatikan undang-undang serta pendapat para ahli yang berkenaan dengan penulisan dalam penelitian ini. Kemudian dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berpikir induktif yang mana cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum.²⁶

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penilitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini yang terdiri dari gambaran umum tentang Kabupaten Kampar yang meliputi: sejarah singkat Kabupaten Kampar, visi-misi, geografis dan demografi Kabupaten Kampar

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pers, 1986), hal.252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta sejarah singkat kantor UPT Pendapatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini membahas tinjauan teori-teori yang berhubungan tentang implementasi, pajak, serta tinjauan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Kampar.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan penelitian tentang:

1. Bagaimana implementasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kampar
2. Apa yang menjadi kendala masyarakat dalam membayarkan pajak kendaran bermotor di Kabupaten Kampar.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A Sejarah Kabupaten Kampar

Dalam rentang waktu yang cukup panjang Kabupaten Kampar telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan, yang tidak bisa dipungkiri, merupakan hasil dari proses pembangunan selama ini. Pembentukan Kabupaten Kampar tidak lepas dari sejarah yang cukup panjang yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada saat itu dimulai dari zaman penjajahan Belanda, zaman Pemerintahan Jepang, zaman Kemerdekaan hingga era otonomi daerah.

1. Zaman Penjajahan Belanda

Pada zaman Penjajahan Belanda ini pembentukan Kabupaten Kampar telah mulai terlihat, namun Kabupaten Kampar masih embrio, belum ada pengelompokkan biaya secara pasti yang dapat dijadikan cikal bakal berdirinya Kabupaten Kampar. Saat itu administrasi dan wilayah Pemerintahannya masih berdasarkan persekutuan hukum adat, yang meliputi beberapa kelompok wilayah yang sangat luas, seperti: Pertama Desa Swapraja meliputi Rokan, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai dan Kepenuhan yang merupakan suatu *Lanschappen* atau raja-raja dibawah *District Loofd* Pasir Pengaraian yang dikepalai oleh seorang Belanda yang disebut *Kontoleur* (Kewedanaan) daerah/ wilayah yang termasuk residensi Riau. Kedua Kedemangan Bangkinang, membawahi kenegerian Batu Bersurat, Salo, Kuok, Bangkinang, Air Tiris termasuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

residen Sumatera Barat, karena susunan masyarakat hukumnya sama dengan Daerah Minang Kabau yaitu Nagari, Koto, dan Teratak. Ketiga, Desa Swapraja Senapelan/Pekanbaru meliputi kewedanan Kampar Kiri, Senapelan dan Swapraja Gunung Sahilan Singingi sampai kenegerian Tapung Kiri dan Tapung Kanan meliputi: Bunut, Pangkalan Kuras, Langgam, Serapung, dan Kualu Kampar (Residensi Riau). Begitu luasnya cikal bakal Kabupaten Kampar oleh Provinsi Sumatera Tengah pada bulan November 1948, disebabkan situasi di waktu itu sudah genting antara Republik Indonesia dengan Belanda²⁶

2. Zaman Penjajahan Jepang

Saat itu guna kepentingan militer Kabupaten Kampar dijadikan satu Kabupaten, dengan nama Riau Nishi Bunshu (Kabupaten Riau Barat) yang meliputi Kewedanaan Bangkinang dan Kewedanaan Pasir Pengaraian, dengan menyerahnya Jepang ke pihak sekutu dan setelah Proklamasi Kemerdekaan, maka kembali Bangkinang ke status semula, yakni Kabupaten Lima Puluh Koto, dengan ketentuan dihapuskannya pembagian administrasi Pemerintahan berturut-turut seperti : CU (kecamatan), GUN (Kewedanaan), BUN (Kabupaten), Kedemangan Bangkinang dimasukkan kedalam Pekanbaru, BUN (Kabupaten) Pekanbaru.

3. Zaman Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, atas permintaan Komite Nasional Indonesia Pusat Kewedanaan Bangkinang

²⁶ <https://Riau.AntaraneWS.Com/Berita/18508/Sejarah-Singkat-Kampar>, di Akses Pada Hari Rabu 16 Februari 2019 Pukul 19.35 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemuka pemuka masyarakat Kewedanaan Bangkinang kepada Pemerintah Keresidenan Riau dan Sumatera Barat agar Kewedanaan Bangkinang dikembalikan kepada status semula, yakni termasuk Kabupaten Lima Puluh Koto Keresidenan Sumatera Barat dan terhitung mulai 1 Januari 1946 Kewedanaan Bangkinang kembali masuk Kabupaten Lima Puluh Koto Keresidenan Sumatera, dan Kepala wilayah ditukar dengan sebutan Asisten Wedana, Wedana dan Bupati. Untuk mempersiapkan pembentukan Pemerintah Provinsi dan Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri maka Komesariat Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi menetapkan peraturan sementara daerah-daerah Kewedanaan dan Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Kabupaten Kampar dalam Provinsi Sumatera Tengah, dengan pembagian 11 (sebelas) Kabupaten di Sumatera Tengah yakni²⁷ :

- a. Kabupaten Singgalang Pasaman dengan Ibukota Bukit Tinggi.
- b. Kabupaten Sinamar dengan Ibukota Payakumbuh
- c. Kabupaten Talang dengan Ibukota Solok.
- d. Kabupaten Samudera dengan Ibukota Pariaman.
- e. Kabupaten Kampar dengan Ibukota Pekanbaru kecuali Kecamatan Singingi, Pasir Pengaraian, dan Kecamatan Langgam.
- f. Kabupaten Kerinci dengan Ibukota Sei Penuh.
- g. Kabupaten Indragiri dengan Ibukota Rengat.

²⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Kabupaten Bengkalis dengan Ibukota Bengkalis. Meliputi Daerah Kewedanaan Bengkalis, Bagan Siapi-siapi, Selat Panjang, Pelalawan kecuali Kewedanaan Langgam dan Kewedanaan Siak.
- i. Kabupaten Kepulauan Riau dengan Ibukota Tanjung Pinang.
- j. Kabupaten Merangin dengan Ibukota Muara Tebo.

Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, dasar penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No.3/DC/STG/50 tanggal 6 Februari 1950, yang kemudian telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Kampar Tingkat II Kampar No.02 Tahun 1999 tentang hari jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, dan disahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Riau No.KTPS.60/II/1999 tanggal 4 Februari 1999 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar tahun 1999 No.01 tanggal 5 Februari 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181) tanggal 4 Oktober 1999 Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu. Dua Kabupaten Tersebut sebelumnya merupakan wilayah Pembantu Bupati Wilayah I dan Pembantu Wilayah II, Kabupaten tersebut memperingati hari jadinya setiap tanggal 6 Februari. Sejak terbentuknya Kabupaten Kampar sampai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan diperingatinya hari jadi Kabupaten Kampar ke-69 tahun yang telah digelar pada Rabu 6 Februari 2019, pejabat yang pernah menjadi pimpinan daerah di Kabupaten Kampar adalah²⁸:

- a. Datuk Wan Abdul Rahman (1 Januari 1950-1 Oktober 1954)
- b. Ali Loeis (April 1954- Maret 1956)
- c. A. Moein Datuk Rangkayo Maharajo (Maret 1956-Maret 1958)
- d. Datuk Abdul Rahman (1959-1959)
- e. Tengkoeh Moehammad (21 Januari 1965-17 Mei 1967)
- f. Datuk Haroensyah (21 Januari 1960- 11 Februari 1965)
- g. Raden. Soebrantas Siswanto (18 Mei 1965- 7 September 1978)
- h. Abdul Makahamid (7 September 1978-7 Maret 1979)
- i. Sartono Hadi Sumarto (14 Februari 1979- 28 Mei 1984)
- j. Syarifuddin (28 Mei 1984- 3 Oktober 1985)
- k. H Imam Munandar (1985-1986)
- l. H. Saleh Yazid (1986-1996)
- m. H Azaly Djohan (April 1996-Desember 1996)
- n. Beng Sabli (1996-2001)
- o. H Syawir Hamid (Maret 2001-Nopember 2001)
- p. H Jefry Noer dan Wakilnya H A Zakir (23 Nopember 2001-2006)
- q. H. M. Rusli Zainal , Plt Bupati Kampar (25 Maret 2004-29 Juli 2005)
- r. Jefry Noer dan wakilnya H A Zakir (29 Juli -23 Nopember 2006)
- s. Marjohan Yusuf Plt Kampar (24 Nopember 2006-11 Desember 2006)

²⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- t. H Burhanuddin Husin dan Wakilnya Teguh Suhono SP(2006-2011).
- u. H. Jefry Noer dan Wakilnya Ibrahim Ali (2011-2015)
- v. H. Azis zainal dan Catur Sugeng Susanto (2016-2022)²⁹

B. Visi dan Misi Kabupaten Kampar

1. VISI

Seluruh komponen Kabupaten Kampar telah menetapkan visi Kabupaten yang menentukan tujuan pembangunan, yaitu untuk menjadikan “*KABUPATEN KAMPAR NEGERI BERBUDAYA, BERDAYA, DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT AGAMIS TAHUN 2025*”

Makna yang terkandung dalam visi ini adalah : Seluruh komponen Kabupaten Kampar berkomitmen untuk menjadikan masyarakat yang berbudaya, dimana segala perilaku seluruh komponen masyarakat haruslah berlandaskan pemikiran logis yang berakal budi, dan menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat yang dianut dan berlaku dalam masyarakat Kabupaten Kampar. Seluruh komponen Kabupaten Kampar memiliki kesungguhan hati untuk menjadikan masyarakat yang berdaya, yaitu dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan guna menjadikan dirinya pesaing tangguh menghadapi persaingan global dan terpenuhinya kebutuhan manusia yang layak serta diperlukan secara adil. Seluruh komponen Kabupaten Kampar bertekad untuk menjadikan masyarakat yang agamis dimana dalam segala aspek kehidupan yang

²⁹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijalankan selalu dilandasi nilai-nilai keagamaan, dengan harapan Kabupaten Kampar dapat menjadi Serambi Mekkah di Provinsi Riau.

2. MISI

Untuk merealisasikan visi tersebut, ditetapkan lima pilar pembangunan, misi Kabupaten Kampar sebagai berikut, yaitu³⁰:

- a. Meningkatkan Ahlak dan Moral. Untuk mewujudkan pilar pertama ini adalah:
 - 1) Membangun masyarakat agamis/beriman.
 - 2) Mengembangkan investasi pariwisata dan kelestarian cagar budaya.
 - 3) Menghargai kesetaraan gender.
 - 4) Menumbuhkembangkan kesadaran hukum
 - 5) Mengembangkan budaya anti-korupsi
 - 6) Memberantas penyakit masyarakat
 - 7) Mengoptimalkan disiplin pegawai negeri sipil
- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia
 - 1) Peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pendidikan unggul terpadu
 - 2) Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam Pembangunan Daerah
 - 3) Menumbuhkembangkan peran pemuda dan prestasi olahraga.
 - 4) Optimalisasi perlindungan dan kesejahteraan sosial.

³⁰ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Menumbuhkembangkan penggunaan Iptek dalam pembangunan daerah
- c. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan
 - 1) Pertumbuhan ekonomi daerah dan sumber-sumber PAD
 - 2) Menumbuhkembangkan UMKM dan Lembaga Keuangan Mikro
 - 3) Menurunkan jumlah pengangguran dan pengentasan kemiskinan.
 - 4) PENCEPATAN pembangunan perikanan air tawar
 - 5) PENCEPATAN pembangunan pertanian dan ketahanan pangan
 - 6) Optimalisasi kualitas dan kelestarian sumber daya mineral air, lahan dan energi yang dapat diperbaharukan.
- d. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
 - 1) PENCEPATAN kualitas pembangunan kesehatan
 - 2) Optimalisasi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan.
 - 3) Percepatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
 - 4) Menumbuhkembangkan peran swasta dalam pelayanan kesehatan.
- e. Meningkatkan Infrastruktur
 - 1) Percepatan pembangunan kawasan strategis
 - 2) Percepatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan
 - 3) Percepatan peran masyarakat dalam pembangunan lingkungan.
 - 4) Percepatan pembangunan sarana dan prasarana sentra ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tinjauan Umum Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Riau Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Kampar

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau dipandang perlu membentuk organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas pendapatan. Maka UPTD ini di resmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau yang menjabat pada masa itu bapak Soeripto, pada tanggal 4 Juli 1989. Secara historis pada awalnya kantor UPT pendapatan Kab. Kampar dispenda Provinsi Riau di bentuk berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau No. Kpts.29 Januari 1974 dan dengan perkembangan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat 2 UU No.5 Tahun 1979 Tentang pokok-pokok pemerintah di daerah melalui perda No.5 Tahun 1979 yaitu Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan sebagaimana terakhir dengan semangat Otonomi Daerah di dasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 dirubah menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Riau³¹.

Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah maka sebagai implementasinya di tetapkan Perda Provinsi Riau No.9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Data Kerja Provinsi Riau (STOK) diantaranya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau mempunyai kedudukan dan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas Otonomi Daerah dan tugas pembantu bidang pendapatan serta dapat di tugaskan untuk dapat melaksanakan

³¹ UPT Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan wewenang yang diperintahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi.

UPT Kabupaten Kampar memiliki tiga (3) pihak kewenangan yang diantaranya pihak Kepolisian Satlantas, pihak Jasa Raharja, dan pihak Dinas Pendapatan Daerah. Tugas dan kewenangan masing-masing pihak adalah sebagai berikut³²:

1. Kepolisian Satlantas

Kepolisian Satlantas mempunyai fungsi dan kewenangan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan, Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Pemeliharaan dan Pengamanan Rekaman atau berkas (arsip).

2. PT Jasa Raharja

PT Jasa Raharja berwenang di bidang pengutipan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), iuran wajib kendaraan bermotor umum dan pelayanan klaim Jasa Raharja .

3. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah)

Dinas Pendapatan Daerah berwenang di bidang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

³² Ibid, hal.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Riau

1. Visi

“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara tahun 2020”
2. Misi
 - a. Tercapainya potensi penerimaan baik dalam bentuk PAD maupun dana Pemerintah
 - b. Terselenggaranya sinkronisasi dalam upaya peningkatan penerimaan daerah
 - c. Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat pengelola pendapatan daerah
 - d. Optimalisasi pelayanan prima kepada masyarakat secara efisien dan efektif sekaligus optimalisasi penerimaan daerah³³.

Uraian Tugas UPT Pendapatan Kabupaten Kampar

1. Kepala UPT

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau sebagian daerah Kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada kepala dinas pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala UPT menyelenggarakan Fungsi³⁴ :

³³ *Ibid*, hal. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melaksanakan pemungutan pajak daerah (PKB, BBN-KB, ABT/AP) di wilayah kerja yang telah ditetapkan.
 - b. Mengadakan kegiatan pelayanan samsat dalam pengurusan PKB, BBN-KB kepada masyarakat.
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait samsat antara lain kepolisian dan PT. Jasa Raharja (persero).
 - d. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan asli daerah.
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pemungutan pendapatan asli daerah.
 - f. Melaksanakan tugas ketatausahaan.
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
 - h. Memberi laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - a. Menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat
 - b. Mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat.
 - c. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun investasi data kepegawaian.

³⁴ *Ibid*, hal. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menyusun rencana anggaran.
 - e. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai
 - f. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelola keuangan.
 - g. Mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang.
 - h. Mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, keamanan.
 - i. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan.
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan³⁵.
3. Kepala seksi penerimaan pendapatan
 - a. Menyusun kegiatan seksi penerimaan pendapatan daerah
 - b. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan wilayah UPT yang telah ditetapkan.
 - c. Pengkoordinasian dan pengelolaan pelayanan samsat
 - d. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor samsat setiap harinya.
 - e. Melaksanakan perencanaan teknis di bidang penerimaan pendapatan daerah.
 - f. Melaksanakan pelayanan di bidang penerimaan pendapatan daerah.
 - g. Menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD).

³⁵ *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ³⁶ *Ibid*, hal. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mempertanggung jawabkan secara administrasi atas pengelolaan yang menjadi tanggung jawab penerimaan kepada pengguna anggaran atau kuasapengguna anggaran Melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan – Surat Keterangan Pajak Daerah (PPK-SKPD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
7. Bendahara khusus pengeluaran
 - a. Melayani belanja rutin UPT pengelolaan pendapatan kabupaten kamper, mengarsipkan surat masuk dan keluar, mengagendakan dan menindaklanjuti surat masuk dan keluar
 - b. Membuat laporan pemakaian anggaran UPT pengelolaan pendapatan kabupaten kamper, dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar
8. Staff³⁷
 - a. Mencetak formulir Surat Pendaftaran dan Formulir Pajak Kendaraan Bermotor (SPPKB) wajib pajak setelah persyaratan sudah di verifikasi.
 - b. Mengontrol penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk merk tipe kendaraan, mengentri data kendaraan tipe kendaraan yang belum ada.
 - c. Koreksi kutipan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pengesahan, perpanjangan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan duplikat

³⁷ Ibid, hal. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengentri data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang belum ada (kosong) dari UPT Pengelolaan Pendapatan Kota dan UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Kampar.
- e. pengesahan yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyetorkan uang tersebut kepada bendahara penerimaan pembantu, kasir penerimaan PKB, dan BBN-KB, pembayaran pajak tahunan.
- f. Mengontrol Penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) sesuai dengan pengambilan dan pendaftaran air permukaan.
- g. Mempertanggung jawabkan penerimaan uang Pajak Air Permukaan (PAP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

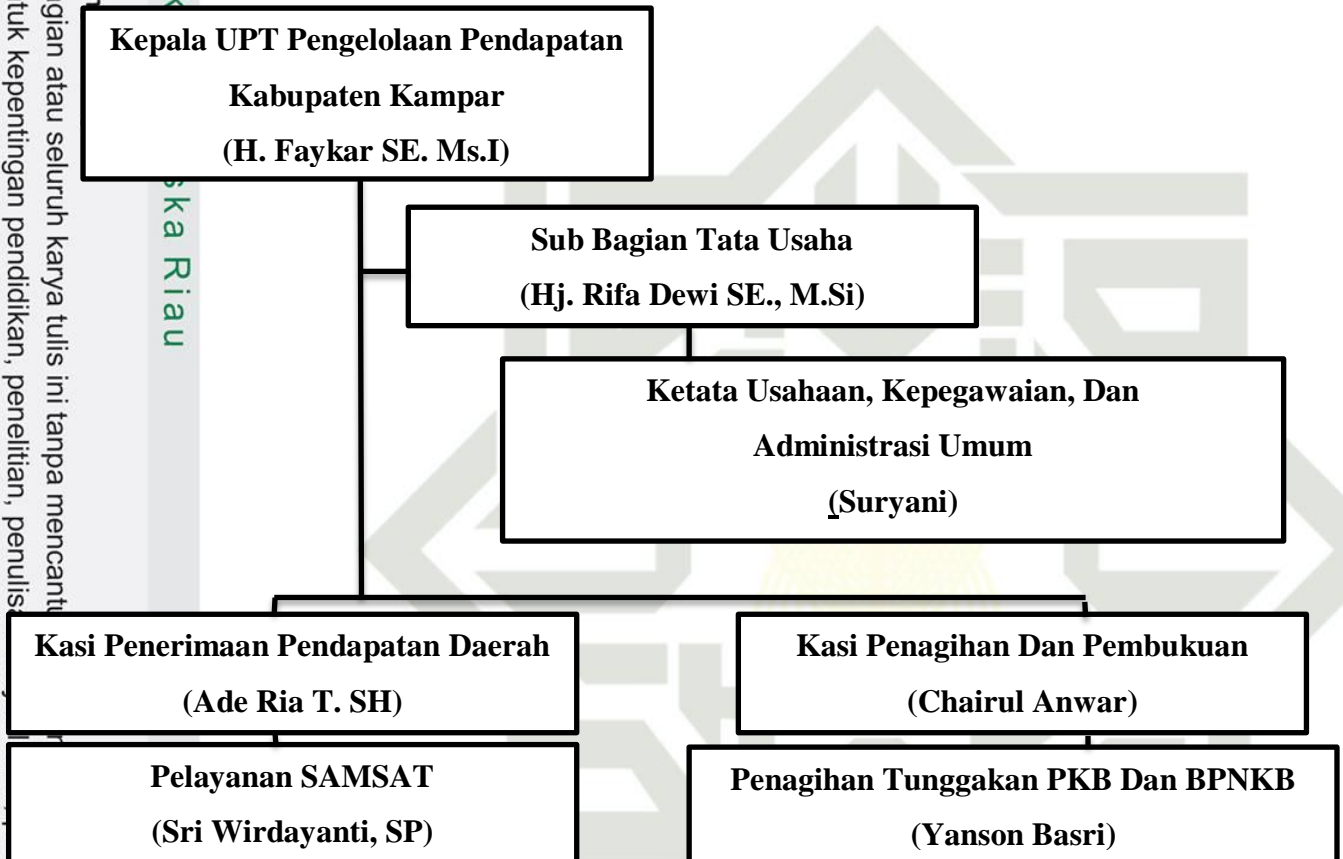
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Organisasi

Gambar II.1

BAGAN ORAGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019



Sumber Data : Kantor UPT Dinas Pendapatan Kabupaten Kampar Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A Pemerintah Daerah

Pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan amanat pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk Undang-Undang dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia²⁷.

Selain itu Pemerintah Daerah juga memiliki arti pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia yang berdasarkan pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi

²⁷ Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten dan Kota Ini mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dengan Undang-undang”.

Pemerintah Pusat tidak mungkin dapat mengatur sendiri seluruh urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, oleh Karena itu diperlukan sebuah pembagian urusan kepada pemerintah tingkat bawah yang disebut dengan Pemerintah Daerah. Pemisahan tersebut dikenal juga dengan nama otonomi. Berdasarkan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 Huruf b yang memiliki maksud bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah bersama perangkat daerah otonom yang lain sebagai sebuah badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan juga kerjasama Internasional Daerah.²⁸

Adapun salah satu tugas DPRD dalam pemerintah adalah dengan melakukan pengawasan, baik kepada Pemerintah Daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dan juga kerja sama Internasional Daerah. Pemerintah Daerah berdasar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 Yang menyebutkan bahwa suatu Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan juga pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dengan sistem dan juga prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945²⁹.

²⁸ Pasal 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

²⁹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ciri-ciri Pemerintah Daerah

Menurut para ahli mengenai ciri-ciri Pemerintah Daerah salah satunya dari J.Oppenhion yang menyatakan bahwa terdapat suatu ciri-ciri Pemerintah Daerah. Adapun ciri-ciri Pemerintah Daerah menurut J.Oppenhion tersebut dibagi dalam beberapa point diantaranya:

- a. Terdapat lingkungan atau suatu daerah yang memiliki batas yang lebih kecil dibandingkan dengan Negeranya
- b. Terdapat penduduk yang cukup
- c. Memiliki kepentingan yang diurus oleh Negara akan tetapi menyangkut tentang lingkungan itu sehingga terdapat penduduk yang bergerak bersama-sama berusaha atas dasar swadaya.
- d. Memiliki suatu organisasi memadai untuk menyelenggarakan kepentingan demikian.
- e. Memiliki kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan³⁰

2. Syarat-syarat Pemerintah Daerah

Adapun Syarat-syarat dalam pembentukan Pemerintah Daerah melalui beberapa pertimbangan antara lain sebagai berikut:

- a. Kemampuan ekonomi
- b. Potensi Daerah
- c. Sosial Budaya
- d. Sosial Politik
- e. Jumlah penduduk

³⁰ Prabawa Utama, *Pemerintahan Di Daerah*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1991) hal. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Luas Daerah dan juga pertimbangan lain yang memungkinkan
 - g. Terselenggaranya Otonomi Daerah³¹
 3. Asas-asas Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah yang ditegaskan dalam penyelenggaraan pemerintah harus memiliki pedoman dimana pada asas umum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara dapat terdiri dari:

- a. Asas Kepastian Hukum
 - b. Asas tertib Penyelenggaraan Negara
 - c. Asas Kepentingan Umum
 - d. Asas Keterbukaan
 - e. Asas Proporsionalitas
 - f. Asas Profesionalitas
 - g. Asas Akuntabilitas
 - h. Asas Efesiensi
 - i. Asas Efektifitas
 - j. Asas Keadilan
 4. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Untuk memahami Pemerintah Daerah dapat disajikan beberapa hal penting yang menyangkut mengenai Pemerintah Daerah terutama berkaitan dengan Tugas, Hak atau Kewenangan Pemerintah Daerah.

³¹ Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas Pemerintah Daerah berdasar kan Pasal 65 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Kepala Daerah memiliki tugas sebagai berikut³²:

- a. Sebagai pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- c. Menyusun dan juga mengajukan suatu rancangan Peraturan Daerah mengenai RPJPD dan juga rancangan Perda RJPMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, selanjutnya dilakukan penyusunan dan penetapan RKPD
- d. Menyusun dan juga mengajukan suatu rancangan Perda mengenai APBD, rancangan Perda mengenai perubahan APBD rancangan Perda mengenai pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada suatu DPRD yang kemudian untuk dibahas bersama-sama
- e. Kepala Daerah juga memiliki tugas dalam mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk suatu kuasa hukum untuk mewakilinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Kepala Daerah memiliki tugas dengan mengusulkan pengangkatan wakil Kepala Daerah

³² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Tugas Kepala Daerah yang lainnya yakni dengan melaksanakan tugas sesuai peraturan Perundang-undangan.

Setelah tugas Pemerintah Daerah, juga terdapat wewenang dari Pemerintah Daerah yang berdasrkan Pasal 65 Ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah memiliki wewenang yang diataranya terdiri atas³³:

- a. Mengajukan rancangan Perda.
- b. Kepala Daerah memiliki kewenangan dalam mengambil tindakan tertentu dalam keadaan yang mendesak dan dibutuhkan oleh daerah ataupun masyarakat.
- c. Kepala Daerah memiliki suatu kewenangan dalam menetapkan Perda yang telah mendapat suatu persetujuan bersama dari DPRD.
- d. Menetapkan Perda Keputusan Kepala Daerah³⁴

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengetian Implementasi

Adapun pengertian implementasi menurut Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo adalah Proses mentasformasikan suatu rencana kedalam praktik. Menurut Presman dan Wildavsky, implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana

³³ *Ibid.*

³⁴ Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hal. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, “ Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menibulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”³⁵

Berangkat dari logika pemikiran ini, maka implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan (*a serial of decisions*) dan tindakan (*action*) yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya³⁶. Adapun perkembangan berikutnya, pemaknaan terhadap implementasi terus menerus mengalami perkembangan. Bagi para peneliti generasi III, contohnya implementasi difahami secara lebih kompleks sebagai sebuah transaksi (pertukaran) berbagai sumber daya yang melibatkan banyak *stakholder*.³⁷

Implementasi kebijakan itu pada prinsipnya adalah cara atau langkah yang dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya,

³⁵ Sholichin Abdul Wahab, *analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan model-model implementasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hlm. 134

³⁶ *Ibid*, hlm. 141

³⁷ Abu Samah Dan Muhammad Ali B. Embi, *Hukum Kebijakan. . . Op,Cit.*, hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peter deLeon dan Linda deLeon (2001) menyatakan bahwa pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi, yaitu:

- a. Pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Pada generasi ini implementasi kebijakan berimpitan dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik.
- b. Pada tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas kebawah”. Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik.
- c. Pada tahun 1990-an memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku dari aktor pelaksana implementasi kebijakan yang lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Mengimplementasikan suatu kebijakan publik dapat dilakukan dua pilihan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan diimplementasikan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari suatu kebijakan publik.³⁸

Dari beberapa uraian diatas mengenai pengertian implementasi kebijakan publik dapat penulis simpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan implementasi kebijakan publik adalah proses yang dilakukan oleh beberapa pihak yang merancang sebuah kebijakan yang bermuara kepada

³⁸ Ilham Arief Sirajuddin, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar*, (Ilmu Administrasi Publik Pps UNM, VOL.4 No. 1 Thn. 2014), hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang menjadi tujuang kebijakan untuk mengupayakan yang sebelumnya kegiatan-kegiatan kebijakan belum nyata sehingga menjadi kenyataan didalam masyarakat.

2. Faktor Keberhasilan Implementasi

Untuk mengetahui sejauh mana suatu pelaksanaan kebijakan pemerintah mencapai tujuannya, maka perlu diketahui beberapa syarat yang mempengaruhi berhasilnya suatu kebijakan yang dilaksanakan. Menurut George C. Edward III terdapat 4 syarat kebijakan, keempat sayarat tersebut adalah³⁹:

a. Komunikasi

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

Transmisi merupakan faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi, artinya sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputasan, ia harus menyadari bahwa keputusan itu telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaan telah dikeluarkan. Faktor konsistensi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, dengan alasan perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Sedangkan faktor kejelasan artinya jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-

³⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi kebijakan itu pun harus jelas.⁴⁰

b. Suber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana dari segi sumber manusianya kurang, akan menghambat daripada pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan, sehingga implementasi itu pun cenderung tidak efektif

c. Disposisi/Sikap

Dimensi disposisi atau sikap pelaksana yang diatikan sebagai keinginan atau kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa yang mereka kerjakan, tetapi mereka juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkannya serta mereka juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.⁴¹

3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan penghambat adalah hal yang menjadi penyebab atau karenanya tujuan atau

⁴⁰Deden Haria Garmana, *Tinjauan Arah Kebijakan Pembangunan Di Daerah Pada Era Otonomi Daerah*, (Jurnal: Dosen STIA Sebelas April Sumedang, 2017), hlm. 73

⁴¹*Ibid*, hlm. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keinginan tidak dapat dilaksanakan. Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu⁴²:

a. Isi kebijakan

Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya adalah yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas atau program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang dilaksanakan. Adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Penyebab lainnya dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau yang sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik, informasi ini justru tidak ada.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan akan sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan.

⁴² Bambang Sunggono, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pembagian potensi

Sebab-musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Yang berkaitan mengenai diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.

Sebenarnya masih banyak lagi pendapat para pakar mengenai apa saja yang menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan, namun penulis hanya mengambil satu pendapat saja yaitu yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

4. Penegakan Hukum

Kemudia efektifitas hukum menurut Sarjono Soekanto dapat di tentukan dari lima faktor di bawah ini yaitu⁴³:

- a. Hukumnya, misalnya harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis
- b. Penegak hukumnya, misalnya telah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya seperti yang telah digariskan oleh hukum yang berlaku
- c. Fasilitasnya, misalnya prasarana yang mendukung dalam proses penegakan hukum
- d. Kesadaran hukum masyarakat, misalnya dalam hal terjadi suatu peristiwa tindak pidana, masyarakat tidak main hakim sendiri

⁴³ R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1989),

- e. Budaya hukumnya, misalnya perlu ada syarat yang tersirat menurut Ruth Benedict yaitu suatu pandangan budaya rasa malu dan budaya rasa bersalah bilamana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum yang berlaku.

Pengertian Pajak

Pajak secara umum dapat di artikan sebagai iyrn wajib rakyat kepada negara dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat di paksakan dengan tidak mendapatka balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Menurut Adrian Sutedi, pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh yang terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang di tetapkan secara umum tanapa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum⁴⁴. Ia juga mengutip beberapa pengertian para ahli sebagaimana di jelaskan berikut ini:

1. Menurut Smeets, pakar dari Jerman, yakni pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
2. Menurut Suparman Sumadwijaya, mengemukakan bahwa pajak adalah iyrn wajib berupa barang yang di pungut oleh penguasa berdasarkan

⁴⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak, Op. Cit*, hal. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari pengertian beberapa pakar di atas dapat dikatakan terdapat lima unsur definisi pokok dalam pajak, yaitu⁴⁵:

1. Iyuran atau pungutan
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tidak menerima kontraprestasi
5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

D. Sistem Perpajakan

Perpajakan merupakan suatu sistem yang kompleks dan harus di analisis dengan pendekatan yang multi disiplin serta di butuhkan berbagai pengetahuan yang beragam jika akan mendisain suatu reformasi di bidang sistem perpajakan⁴⁶. Secara umum sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur yakni, tax policy, tax law, dan tax administration.

1. Tax Policy

Kebijakan negara merupakan program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Kemudian kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti yang sempit. Kebijakan fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk memengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Haula Rosdiana Dan Edi Slameterianto, *Pengantar Ilmu Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak dan pengeluaran belanja negara⁴⁷. Pajak adalah aplikasi dari kebijakan negara dan antara pajak dan kebijakan negara tidak dapat di pisahkan.

2. Hukum pajak (*Tax law*)

Hukum pajak sebagai suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan pemasukan pajak ke kas negara serta juga sebagai penunjang pembangunan nasional terutama dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi⁴⁸.

3. Tax administrasion

Administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama⁴⁹. Administrasi pajak disini yang dimaksud adalah sebagai prosedur yang meliputi antara lain tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak.

Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi buggetair dan fungsi regulerend.

1. Fungsi budgetair

Fungsi anggaran atau budgetair adalah fungsi pajak untuk memperoleh uang atau dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya untuk

⁴⁷ Siti Kurnia Rahayu, *Sistem Perpajakan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 93

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membiayai pengeluaran pemerintah di sektor publik yang pemungutannya berdasarkan undang-undang⁵⁰.

2. Pajak regulerend

Yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga jenis sistem pemungutan pajak:

1. *Official assesment system*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. ciri-ciri *Official assesment system* adalah wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.
2. *Self assesment system*, adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepadawajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.
3. *With holding system*, adalah pemungutan pajak yang yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak⁵¹.

⁵⁰ Azhari, *Pengantar Perpajakan Dan Hukum Pajak*, (Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2007), hal. 5

⁵¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pemungutan hukum pajak mempunyai asas-asas yang di antaranya adalah:

1. Asas Pemungutan Domisili

Pengenaan pajak tergantung tempat tinggal atau domisili wajib pajak. Negara berhak mengenakan pajak atas keseluruhan penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang menurut Undang-Undang dikenakan pajak. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. dengan kata lain tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak di hubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang di hubungkan dengan kebangsaan atas suatu negara⁵².

4. Asas Falsafah Hukum

Menurut asas ini pemungutan pajak harus di dasarkan pada falsafah hukum.

5. Asas Yuridis

Menurut asas ini pajak harus di dasarkan pada Undang-Undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat (2) UUD 1945.

⁵² Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Asas Ekonomis

Asas ini menekankan pada pemikiran bahwa Negara menghendaki agar pemikiran kehidupan ekonomi terus meningkat.

7. Asas Finansial

Sesuai dengan fungsi budgetair maka sudah tentu bahwa biaya dalam pengenaan pajak harus sekecil-kecilnya, di bandingkan dengan pendapatan⁵³.

Retribusi Daerah, Sumbangan dan Iyuran

1. Retribusi daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau di berikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pelayanan jasa yang di maksud kemudian di bagi lagi menjadi dua yaitu jasa umum dan jasa khusus. Jasa umum, adalah jasa yang di sediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan dan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan

⁵³ Abu Samah, *Hukum Kebijakan...Op.Cit*, hal.21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjadi kelestarian lingkungan⁵⁴

Retribusi daerah berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak, Retribusi yang dapat disebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Jenis retribusi daerah di kelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:

A. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping itu untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.

⁵⁴ Mardiasmo, *Perpajakan... Op.Cit*, hal.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Retribusi dapat di panggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b. Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Pencatatan Sipil.
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat.
- e. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

B. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha di tetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut⁵⁵:

- a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya di sediakan oleh sektor swasta tapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jenis retribusi jasa usaha:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - b. Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan.
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan
 - d. Retribusi Terminal
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Penggarahan/ Villa
 - g. Retribusi Penyedotan Kakus
 - h. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 - j. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
 - k. Retribusi Penyebrangan Diatas Air
 - l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - m. Retribusi Penjualan Produksi Daerah
- C. Retribusi Perizinan Tertentu.
- Retribusi Perizinan Tertentu di tetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:
- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perizinan tersebut benar-benar di perlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek⁵⁶

Ada beberapa macam sumbangan masyarakat yang dimasukkan kedalam kas daerah, antara lain :

2. Sumbangan

Pada sumbangan pungutan yang dilakukan tidak berdasarkan undang-undang, tapi lebih bersifat pada golongan masyarakat tertentu. Unsur yang terkandung pada sumbangan adalah sukarela yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut Azhari, sumbangan mengandung fikiran bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu, tidak boleh dikeluarkan dari kas umum, karena prestasi ditujukan tidak kepada penduduk seluruhnya melainkan hanya untuk sebahagian masyarakat

⁵⁶ *Ibid*, hal. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu saja⁵⁷. Namun pengertian tentang tidak boleh di keluarkan dari kas negara ini perlu di pertimbangkan lagi, sebab hingga sekarang penggunaan kas umum sering dilakukan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengantisipasi bencana alam.

3. Iuran

Iuran adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa atau fasilitas yang disediakan oleh negara untuk sekelompok orang dan pembayar iuran mendapat jasa kontra prestasi secara langsung⁵⁸.

H. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Bersamaan dengan persetujuan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat yang memutuskan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dalam rangka untuk menarik sumber pendapatan asli daerah atau yang di sebut dengan APBD telah diatur beberapa pasal mengenai pajak kendaraan bermotor⁵⁹. Sesuai dalam peraturan ini pasal 1 yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Riau.

⁵⁷ Azhari, *Pengantar Perpajakan...Op.cit* , hal. 63

⁵⁸ *Ibid*, hal 67

⁵⁹ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pejabat berwenang adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Riau.
7. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Gubernur Riau.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
9. Dinas Pendapatan selanjutnya disingkat DIPENDA adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dal dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang yang dipungut bayaran ;
15. Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai dipergunakan untuk orang pribadi, badan, Kementerian/Lembaga Negara dan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Pusat / Daerah.
16. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat atau Alat-Alat Besar adalah alat-alat yang dapat bergerak atau berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
18. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. Penguasaan adalah penggunaan dan penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundangan yang berlaku.
20. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaran bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu ;
26. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim atau jangka waktu lain, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghitungan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
29. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak dan Tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak berdasarkan Peraturan Daerah untuk masing-masing jenis Pajak Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat pemberitahuan dari Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
31. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak terutang dan tidak ada kredit pajak.
37. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
38. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
39. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Surat Pajak adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang penulis dapat di tarik kesimpulan berupa:

1. Implementasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kampar
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah masih rendah. Adapun kurangnya implementasi dari Perda tersebut sesuai dengan pasal 9 ayat 1 di sebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang intensif dilakukan petugas perpajakan tentang pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah. Serta kurang berjalannya fungsi pengawasan dan penindakan berdasarkan pasal 37 ayat 2 yang dilakukan petugas perpajakan terhadap wajib pajak yang ada di Kabupaten Kampar. Tentunya berdampak pada kurangnya penerimaan kas negara untuk mewujudkan pembangunan daerah yang pada akhirnya masyarakat yang akan menikmati hasil pajak yang telah di bayarkan.
2. Adapun faktor kendala yang di alami masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah:
 - a. Faktor jarak
 - b. Faktor waktu
 - c. Faktor ekonomi
 - d. Kurangnya sosialisasi program yang mendukung tentang pelaksanaan program pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kampar

- e. Kurangnya Pelayanan dan Fasilitas Yang Kurang Baik

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Lebih menekankan fungsi pejabat perpajakan daerah serta dengan dukungan semua pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat agar terlebih dahulu melakukan komunikasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat supaya lebih peduli terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Mengoptimalkan peran pejabat perpajakan di bidang pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
3. Petugas lebih mengoptimalkan program-program yang mempermudah pembayaran pajak di tengah masyarakat seperti e-samsat, samsat keliling dan program lainnya
4. Masyarakat agar lebih meningkatkan rasa peduli untuk membayar pajak kendaraan bermotornya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Abu Samah, *Memahami Hukum Pajak di Indonesia*, Pekanbaru: Uin Suska, 2016
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Pt. Rajawali Pers, 2004
- Azhari, *Pengantar Perpajakan Dan Hukum Pajak*, Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2007
- _____, *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers,
- _____, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994
- Djoko Mulyono, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: Andi, 2010
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alvabeta, 2013
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska, 2011
- Haula Rosdiana Dan Edi Slameterianto, *Pengantar Ilmu Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2009
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1989
- Sholihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014
- Sti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- _____, *Sistem Perpajakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 1982

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pers, 1986

Jonoo, Sukanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009

Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Wirawan B. Ilyas, Richart Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2013

Y Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta Cv Andi Offset, 2009

Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbn-Kb)

C. Referensi Lain

Ankam Cahyadi, *Membuka Tabir Kesadaran Hukum*, Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Vol.4, 2017

Beden Haria Germana, *Tinjauan Arah Kebijakan Pembangunan Di Daerah Pada Era Otonomi Daerah*, Jurnal : Dosen STIA Sumedang, 2017

Elya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal: Fakultas Ushuludin IAIN Raden Intan Lampung Vol. 10, 2014

Triati Is, *Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Rokan Hulu*, Jurnal Ilmu Ekonomi ,Vol.2.No.1 Januari 2013



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Printin Anggraini, Analisis *Implementasi kebijakan Pembentukan Account Representative Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara)*, Jurnal: FE UI, 2010

Ham Arif Sarajudin, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makasar*, Jurnal: Ilmu Administrasi Publik PPS UNM, Vol.4 No.1 2014

<http://Www.Riaupos.Co/8656-Berita-Warga-Kampar-Keluhkan-Bayar-Pajak-Kendaraaan.Html#.Xehj612yqew>, di Akses Pada Hari Rabu 13 Februari 2019 Pulul 19.35 Wib

<https://Riau.Antaraneews.Com/Berita/18508/Sejarah-Singkat-Kampar>, di Akses Pada Hari Rabu 16 Februari 2019 Pulul 19.35 Wib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR WAWANCARA

Judul : Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Kampar Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

- Kami mohon Bapak/Ibu menjawab pertanyaan ini.
- Pertanyaan ini digunakan untuk penelitian skripsi sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum UIN SUSKA Riau.
- Jawablah pertanyaan dibawah ini berdasarkan pendapat Bapak/Ibu.
- Terimakasih kami sampaikan kepada Bapak/Ibu atas waktu dan kesempatan serta kerjasamanya.

Pertanyaan.

- Apakah menurut Bapak/Ibu masyarakat atau wajib pajak sudah mengetahui bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor?
- Bagaimana kesadaran hukum masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor ?
- Apakah penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya sudah dapat dilakukan secara maksimal?
- Apakah ada bimbingan, pengarahan, serta sosialisasi yang insentif kepada masarakat selaku wajib pajak kendaraan bermotor?
- Apa kendala yang di alami oleh bapak dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?
- Ketika bapak menemukan masyarakat yang melanggar melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah tindakan apa yang bapak ambil?
- Apa akibat hukum dari keterlambatan bayar pajak oleh wajib pajak?

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUISIONER

Judul Penelitian: Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Kampar Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Nama :
Usa :
pekerjaan :
Jenis Kendaraan Bermotor :
☐roda dua ☐ roda empat ☐.....

- Alamat :
- Kami mohon Saudara menjawab pertanyaan ini.
 - Pertanyaan ini digunakan untuk penelitian skripsi sebagai syarat gelar Sarjana Hukum UIN SUSKA Riau.
 - Jawab pertanyaan dibawah ini berdasarkan pendapat Saudara.
 - Terimakasih kami sampaikan kepada Saudara atas waktu dan kesempatan serta kerjasamanya.

Tandai jawaban di bawah ini sesuai dengan pendapat Saudara.

- Apakah Saudara sudah mengetahui kewajiban membayar pajak tahunan kendaraan bermotor?
 - Sudah
 - Belum
- Apakah saudara mengetahui peraturan yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor?
 - Sudah
 - Tidak
- Apakah saudara mengetahui pasal yang mengatur tentang kewajiban membayar pajak tahunan kendaraan bermotor sesuai Perda Provinsi Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?
 - Tidak
 - ya
- Apakah Saudara sudah melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor tahun ini?
 - Sudah
 - Belum
- Apakah faktor jarak mempengaruhi saudara dalam membayar pajak?
 - ya
 - tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif I

6. Apakah faktor waktu mempengaruhi saudara dalam membayar pajak?
 - a. ya
 - b. tidak
7. Apakah faktor ekonomi mempengaruhi saudara dalam membayar pajak?
 - a. ya
 - b. tidak
8. Apakah fasilitas pelayanan kantor Samsat Bangkinang sudah memadai bagi wajib pajak?
 - a. sudah
 - b. belum
9. Pernahkan Saudara mendapat sosialisasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?
 - a. Pernah
 - b. Tidak
10. Apakah saudara setuju jika kendaraan bermotor di kenakan pajak?
 - a. Setuju
 - b. Tidak
11. Apakah Saudara pernah mendapat Sanksi Hukum (denda) oleh Dinas Pendapatan Daerah tentang keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor ?
 - a. Pernah
 - b. Tidak
12. Apakah saudara mengetahui bahwa pemabayaran pajak harus dilakukan tepat waktu?
 - a. Ya
 - b. Tidak
13. Apakah saudara mengetahui cara penghitungan besaran denda telat bayar pajak kendaraan bermotor?
 - a. Ya
 - b. tidak
14. Apakah saudara setuju dengan besaran nilai pajak yang di kenakan terhadap kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan daerah provinsi riau nomor 4 tahun 2015?
 - a. Setuju
 - b. tidak
15. Setujukah saudara dengan persyaratan berkas yang di tetapkan saat pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor?
 - a. Setuju
 - b. tidak

No	JENIS PENDANAAN	JUMLAH PENDANAAN							P.R.B			D.R.R			Jumlah		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	Penet	Denda	Penet	Denda			
1	KENDARAAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	95,78	9.038	2.021.817.500	881.395	2.021.711.105			
2	PELENGKAP	589	75	6.560	26	0	0	21.041	1.082	33.318	42.312	310.31.655.706	2.080.183.819	340.211.72.927			
3	KEPERAWATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	KEPERAWATAN SOKAT	1	1	4	0	0	0	117	26	0	1.724	3.160.324.792	206.488.171	10.744.200			
5	KEPERAWATAN BAKAR	91	151	899	3	0	0	349	118	0	1.724	1.070.164.457	297.943.959	1.363.108.412			
6	KEPERAWATAN BAKAR	22	42	325	9	4	118	126	0	0	1.016	451.779.314	81.779.314	533.550.000			
7	KEPERAWATAN BAKAR	8	9	94	0	0	0	1.016	1.206	0	0	933.379.023	81.814.303	1.015.190.306			
8	KEPERAWATAN BAKAR	6	73	127	8	0	121	0	0	26	0	0	0	0			
9	KEPERAWATAN BAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	KEPERAWATAN BAKAR	2	1	20	0	0	0	0	0	209	248	114.093.125	8.143.300	127.836.325			
11	KEPERAWATAN BAKAR	0	0	0	0	0	0	18	0	0	19	156.608.000	3.061.135	18.720.135			
12	KEPERAWATAN BAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	KEPERAWATAN BAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	KEPERAWATAN BAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	112.121.250	1.138.335	156.555.015			
15	KEPERAWATAN BAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	KEPERAWATAN BAKAR	4	2	5	0	0	0	4	0	0	25	55.605.000	15.605.000	69.002.000			
17	KEPERAWATAN BAKAR	19	3	812	0	0	0	112	0	0	1.251	5.111.311.066	199.643.358	2.561.936			
18	KEPERAWATAN BAKAR	0	0	10	9	0	3	0	0	28	0	30.991.000	3.172.889	34.110.889			
19	KEPERAWATAN BAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	KEPERAWATAN BAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	KEPERAWATAN BAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	KEPERAWATAN BAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	KEPERAWATAN BAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	KEPERAWATAN BAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	KEPERAWATAN BAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
588	TOTAL PENDANAAN	1.088	8.745	26	4	2.585	2.080	0	46.411	7.414	33.312.424	5.007.1.041.6	44.572.545.600	78.156.484.600	75.480.510	18.518.480.510	80.897.480.510

MENGEHATI
KEPALA UPT PENDAPATAN DAERAHBANGKINANG, 28 Februari 2019
BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

HR. FIRMAN, S. Sos. M. S.
NIP. 196705071993011001

BUKRIHANUDDIN
NJP. 195703001980031 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR : JUMLAH REALISASI PKB, BBNKB-I dan BBNKB-II
MENURUT KENDARAAN UMUM DAN KENDARAAN NON UMUM
TANGGAL 01 JANUARI 2017 S/D 31 DESEMBER 2017

NO	JENIS KENDARAAN	P K B		BBNKB-I		BBNKB-II	
		WP	Realisasi Kend. (Umum)	WP	Realisasi Kend. Non Umum	WP	Realisasi Kend. Non Umum
1	Sedan	0	0	559	949.093.343	0	0
2	Jeep	0	0	988	3.214.681.550	0	0
3	Minibus	93	47.208.026	5.119	15.191.001.717	2	154
4	Bus dan sejenisnya	0	0	0	0	0	1.313.241.299
5	Microbus	6	3.519.587	18	40.617.988	0	0
6	Pick Up	1	219.000	2.607	4.523.263.350	0	4
7	Truck	1.258	3.214.307.618	1.098	4.515.412.066	97	264
8	Sepeda Motor R2	0	0	10.366.147.103	0	182.545.741	112
9	Sepeda Motor R3	0	0	2.873.470	3.500.000	0	1.772
10	Alat-alat Berat	0	0	0	0	0	228.674.745
J U M L A H		1.358	3.265.954.231	62.299	38.801.680.615	0	0

MENGETAHUI
PI. KEPALA UPT PENDAPATAN DAERAH

H. FAYYAH, S.E.M.S.
NIP. 195040507 199011 1 001

BANGKINANG, 17 Juni 2019
BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU

AUDIA TELUKMAMUJAU, S.H.
NIP. 19810715 200903 2 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR : JUMLAH REALISASI PKB, BENKE-I dan BENKE-II
MENURUT KENDARAAN UMUM DAN KENDARAAN NON UMUM
TANGGAL 01 JANUARI 2016 S/D 31 DESEMBER 2016

NO	JENIS KENDARAAN	P K B		BENKE-I				BENKE-II		
		WP	Realisasi Kend. Umum	WP	Realisasi Kend. Non Umum	WP	Realisasi Kend. Umum	WP	Realisasi Kend. Umum	Realisasi Kend. Non Umum
1	Sedan	0	0	635	982.859.729	0	0	0	0	94.572.088
2	Jeep	0	0	1.071	3.168.365.781	0	0	213	371.891.830	0
3	Minibus	119	46.694.671	8.077	14.069.573.605	0	0	9	2.159.330	1.109.241.755
4	Bus dan sejenisnya	0	0	1	2.173.000	0	0	0	0	0
5	Microbus	10	5.552.088	16	31.373.125	0	0	0	0	2.848.000
6	Pick Up	1	264.810	3.037	5.815.592.511	0	0	371	294.369.041	0
7	Truck	1.423	3.897.979.312	1.515	6.188.787.075	0	0	83	153.910.289	183.512.914
8	Sepeda Motor R2	0	0	53.276	11.052.153.978	0	0	9.901	3.969	360.837.887
9	Sepeda Motor R3	0	0	4	320.805	0	0	0	0	0
10	Alat-alat Berat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J U M L A H		1.558	3.840.490.831	67.632	41.314.403.809	0	0	9.901	156.068.819	2.387.273.515

MENGETAHUI
PE. KEPALA UPT PENDAPATAN DAERAH

BANGKINANG, 17 Juni 2019
BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU

H. FAYKHAH, S.E., M.Si
NIP. 196405071990111001

ADIRIA TELALUMBANUA, SH
NIP. 198107152009032002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak ci

f Sultan Syarif Kas

© Hak ci



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kas



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH"** yang ditulis oleh :

Nama : **Tri Galuh Suwito**
NIM : 11427103997
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris
Dra. Nurlaili, MSi

Penguji I
Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II
Lovelly Dwina Dahan, SH., MH

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, S. Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **"KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN KAMPAR DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH"**, ditulis oleh saudara :

Nama : Tri Galuh Suwito
NIM : 11427103997
Program Studi : Ilmu Hukum

Di seminarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis/ 14 Februari 2019
Narasumber : Nur Hidayat, SH. MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub Bagian Akademik

Asfendi, S.Ag. M.Si
NIP. 196109181988031002

Pekanbaru, 20 Februari 2019
Narasumber

Nur Hidayat, SH. MH
NIK. 13027038

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jalan. H.R Soebrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru-Riau No.
TELP. 0761-561645 Fax. 0761-562052. Web. www.uinsuska.ac.id.

**LEMBARAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK**

Hj. Nur'aini Sahu. SH, MH

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN)

Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian kelompok yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEKERJA DALAM PEMBERIAN UPAH DI RUMAH SAKIT
SURYA INSANI PASIR PENGARAIAN KABUPATEN ROKAN HULU
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003"** yang
disusun oleh:

1. **HENDRI**
NIM. 11427103927
2. **RAHMAD DARMAWAN**
NIM. 11427103907
3. **TRI GALUH SUWITO**
NIM. 11427103997

Setelah diberikan arahan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka
Laporan Penelitian Kelompok ini dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu
syarat untuk penelitian skripsi.

Pekanbaru, 11 Januari 2018
Pembimbing,

Hj. Nur'aini Sahu. SH, MH
NIP. 11590711 199503 2 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3001/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TRI GALUH SUWITO
N I M : 11427103997
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : **13 MARET 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 27 Maret 2019

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP.195807121986031005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2356/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 18 Maret 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : TRI GALUH SUWITO
NIM : 11427103997
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : UPT PENDAPATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
BANGKINANG BAPENDA PROVINSI RIAU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Kampar Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 7005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/21048
 TENTANG



182010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset/Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/356/2019 Tanggal 18 April 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

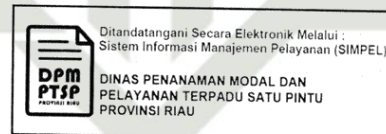
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : TRI GALUH SUWITO |
| 2. NIM / KTP | : 11427103997 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN KAMPAR
MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARAKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : UPT PENDAPATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG
BAPENDA PROVINSI RIAU |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 April 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Pekanbaru

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANGKOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/268

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN RISET/21048 tanggal 01 April 2019 dengan ini memberi Rekomendasi / Izin Penelitian kepada :

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | TRI GALUH SUWITO |
| 2. NIM | : | 11427103997 |
| 3. Universitas | : | UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN KAMPAR
MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH |
| 8. Lokasi | : | UPT PENDAPATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG
BAPENDA PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 04 April 2019

a.n. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL**
Kasi Kesatuan Bangsa

ONNITA, SE
NIP. 19661208 199201 1 001

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Kepala UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Bangkinang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru 28284
Telp. (0761) 859750, 859751, 859752, 859754, 859756 Fax. (0761) 859750, 859755
Website : www.badanpendapatan.riau.go.id

NOTA - DINAS

Dari : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
Kepada : Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Kampar
Nomor : 071/ND/Bapenda/10.1
Tanggal : 23 Mei 2019
Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/21048 Tanggal 01 April 2019, Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan skripsi, bersama ini diharapkan kepada saudara untuk membantu memberikan data/informasi yang dibutuhkan.

Adapun nama mahasiswa yang bersangkutan yaitu :

Nama : TRI GALUH SUWITO
NIM : 11427103997
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Penelitian : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN KAMPAR MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dapat ditindaklanjuti.

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI RIAU
SEKRETARIS,


Hj. RAUDA RIZA, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630918 198903 2 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENDAPATAN KABUPATEN KAMPAR
Jalan. Letnan Boyak No. 74 Telp. (0762) 20285 Bangkinang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 870/SK/BAPENDA/UPT.05/i02

Plt.Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TRI GALUH SUWITO
NIM : 11427103997
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU

Telah selesai melaksanakan Riset/ Penelitian pada UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 17 Juni 2019

An.Plt.KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG
BAPENDA PROVINSI RIAU,
Kasubag Tata Usaha



HI. RIFA DEWA SE, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19690412 199401 2 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@Jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **TRI GALUH SUWITO**

NIM : **11427103997**

Jurusan : **ILMU HUKUM**

Judul : **IMPLEMENTASI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH**

Pembimbing : **H. Mhd. Kastulani SH., MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 November 2019

An. Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahril, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Tri Galuh Suwito, Lahir di Pajajaran/Sei. Galuh Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Provinsi Riau, pada tanggal 26 April 1995. Anak ke 3 dari 4 bersaudara dari pasangan Ayahanda Sipon dan Ibunda Kasmini. Pendidikan formal yang di tempuh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 007 Kualu Nenas dan lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Tambang dan lulus pada tahun 2010. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Tambang dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan program studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau , Jurusan Ilmu Hukum (HTN) pada Fakultas Syariah Dan Hukum. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan PKL di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara di Pekanbaru dan juga telah melaksanakan KKN di Desa Koto Ringin, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tahun 2017. Penulis melaksanakan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH” lulus setelah diunaqasahkan dengan hasil sangat memuaskan pada tanggal 27 Agustus 2019 dan mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H)